

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Citra korporat (*corporate image*) memiliki peran penting dalam pemasaran, secara langsung maupun tidak langsung. Citra korporat pada hakikatnya adalah persepsi publik terhadap perusahaan. Dalam persepsi publik, citra perusahaan terbentuk dari asosiasi antara perusahaan sebagai subyek dan atribut-atributnya seperti: baik, buruk, berkualitas, peduli lingkungan, bertanggung jawab dan lain-lain.

Reputasi yang baik akan memberi keuntungan ketika berhubungan dengan pemasok, dapat meningkatkan *bargaining position*. Demikian pula dalam berhubungan dengan jalur distribusi, perusahaan yang mempunyai reputasi baik akan mendapat perlakuan khusus. Apalagi berhubungan dengan publik keuangan, akan mendapatkan banyak kemudahan. Dengan demikian, nilai perusahaan di mata publik akan meningkat sehingga investor berani membayar premium untuk *market value* dari saham yang beredar di pasar.

Tugas untuk memelihara citra perusahaan harus dilakukan oleh segenap anggota organisasi secara lintas fungsional, dan harus dilakukan secara terus menerus. Harus ada sebuah sistem yang eksis untuk menopang citra perusahaan. Salah satu sistem yang sedang naik daun adalah *Good Corporate Governace*, terutama sejak kasus ENRON yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari *good corporate governance*. Keruntuhan perusahaan-perusahaan

publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*.

Secara umum, *corporate governance* merupakan sarana, mekanisme, dan struktur yang berperan sebagai pengawasan atas *self-serving behavior* manajer (Short et al.,1999). Pengelolaan perusahaan yang terbuka (*transparent*) dan *accountable* bisa mencegah terjadinya *self-serving behavior*. Seperti diungkapkan oleh Keasey dan Wright (1997) '*its [corporate governance's] key elements concern the enhancement of corporate performance via the supervision, or monitoring, of management performance and ensuring the accountability of management to shareholders and other stakeholders.*' Good corporate governance dengan demikian bisa diartikan sebagai interaksi antara struktur dan mekanisme yang menjamin adanya kontrol dan *accountability*, namun tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan.

Hal ini berarti bahwa *good corporate governance* tidak saja berakibat positif bagi pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas yang berupa pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itulah berbagai lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti World Bank dan International Monetary Fund sangat berkepentingan terhadap penegakan *corporate governance* di negara-negara penerima dana karena mereka menganggap bahwa *corporate governance* merupakan bagian penting sistem pasar yang efisien.

Asian Corporate Governance Association adalah lembaga non-profit yang bekerjasama dengan investor, perusahaan dan regulator dalam menilai seberapa

efektifkah proses pengimplementasian *good corporate governance* di negara Asia.

Tabel 1.1

Skor GCG tahun 2010-2014

CG Watch market scores: 2010 to 2014					
(%)	2010	2012	2014	Change 2012 vs 2014 (ppt)	Trend of CG reform
1. = Hong Kong	65	66	65	(-1)	Weak leadership, tough enforcement
1. = Singapore	67	69	64	(-5)	International vs local contrast continues
3. Japan	57	55	60	(+5)	Landmark changes, can they be sustained?
4. = Thailand	55	58	58	-	Improving, but new legislation needed
4. = Malaysia	52	55	58	(+3)	Improving, but still too top-down
6. Taiwan	55	53	56	(+3)	Bold policy moves, can they be sustained?
7. India	48	51	54	(+3)	Bouncing back, Delhi more supportive
8. Korea	45	49	49	-	Indifferent leader, more active regulators
9. China	49	45	45	-	Focus on SOE reform, enforcement
10. = Philippines	37	41	40	(-1)	Slow reform, improved company reporting
10. = Indonesia	40	37	39	(+2)	Big ambitions, can they be achieved?

Sumber: Asian Corporate Governance Association

Tabel 1.2

Kategori penilaian GCG tahun 2010-2014

Market Category Scores

(%)	Total	CG Rules & Practices	Enforcement	Political & Regulatory	IGAAP	CG Culture
1. =Hong Kong	65	61	71	69	72	51
1. =Singapore	64	63	56	64	85	54
3. Japan	60	48	62	61	72	55
4. = Thailand	58	62	51	48	80	50
4. = Malaysia	58	55	47	59	85	43
6. Taiwan	56	48	47	63	75	47
7. India	54	57	46	58	57	51
8. Korea	49	46	46	45	72	34
9. China	45	42	40	44	67	34
10. = Philippines	40	40	18	42	65	33
10. = Indonesia	39	34	24	44	62	32

Sumber: Asian Corporate Governance Association

Indonesia dinilai lemah dalam berbagai aspek penilaian. Menurut ACGA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai super regulator harus menjadi katalis untuk reformasi berkelanjutan. Beberapa kemajuan juga jelas dalam peraturan audit. Tetapi keberhasilan tergantung pada kemauan politik, meningkatkan regulasi dan memastikan orang yang tepat berada di tempat yang tepat.

Berbagai tulisan memaparkan konsekuensi negatif dari *weak governance system* dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi *corporate governance*. Iskander dan Chamlou (2000), menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya *corporate governance* yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas.

Upaya pengembangan *good corporate governance* ditujukan untuk mendorong optimalisasi alokasi atau penggunaan sumber daya perusahaan agar pertumbuhan dan kesejahteraan pemilik perusahaan terjaga. *Corporate governance* pada dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham). Masalah ini muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan kewenangan atas pengelolaan perusahaan kepada

manajer profesional. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya perusahaan sepenuhnya ada di tangan para eksekutif.

Pemegang saham mengharapkan manajemen bertindak secara profesional dalam mengelola perusahaan. Setiap keputusan yang diambil seharusnya didasarkan pada kepentingan pemegang saham dan sumber daya yang ada digunakannya semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan (nilai) perusahaan. Meskipun demikian, yang sering terjadi adalah bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan tapi juga untuk kepentingan para eksekutif. Bahkan dalam banyak kasus, keputusan dan tindakan yang diambil seringkali hanya menguntungkan eksekutif dan merugikan perusahaan.

Dengan kata lain, manajemen mempunyai agenda (kepentingan) yang berbeda dengan kepentingan pemilik. Penggunaan *creative accounting*, *business failures*, *limited roles of auditors*, tidak adanya hubungan yang jelas antara sistem kompensasi dengan kinerja, penekanan pada kinerja (laba akuntansi) jangka pendek yang mengorbankan *long-term economic profits*, dan sebagainya (Keasey dan Wright, 1997) merupakan beberapa contoh penyimpangan perilaku manajer.

Hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen merupakan paradigma hubungan *principal-agent*, dimana pemilik perusahaan sebagai *principal* mempercayakan secara formal dalam bentuk kontrak hubungan kerja kepada manajemen sebagai *agent* yang memberikan jasa manajerialnya. Kompensasi merupakan nilai jasa yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajemen (Jensen dan Meckling, 1976).

Isu *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* (teori keagenan) yang menyatakan bahwa permasalahan *agency* muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Dewan komisaris dan direksi yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Dengan kewenangan yang dimiliki maka manajer mempunyai kemungkinan untuk tidak bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*).

Struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan informasi asimetri (Itturiaga dan Sanz, 2000) dalam Faizal (2004). Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Pendekatan informasi asimetri memandang mekanisme struktur kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insiders* dan *outsiders* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Sedangkan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan,

institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun.

Kusumawati dan Riyanto (2005), menguji apakah variabel *corporate governance* yang berupa tingkat transparansi GCG dan ukuran dewan komisaris memiliki hubungan dengan nilai perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat *compliance* berhubungan positif dengan nilai pasar perusahaan. Jumlah anggota komisaris terbukti berhubungan positif dengan tingkat GCG dan tingkat *cross-directorships* yang dilakukan oleh anggota direksi dan komisaris menunjukkan arah negatif. Data yang digunakan adalah laporan tahunan 2001 perusahaan yang listing di BEI.

Johan Wahyudi (2010) menyatakan transparansi GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, *cross-directorship* dewan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Erna Hidayah (2008) membahas pengaruh kualitas pengungkapan informasi terhadap hubungan antara penerapan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan di BEI, menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* ternyata tidak mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. Demikian juga pengungkapan wajib dan ketepatanwaktuan penyampaian informasi, ternyata bukan merupakan variabel moderating.

Anindhita Ira Sabrinna (2010) juga menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara *corporate governance* dengan kinerja pasar, tetapi terdapat hubungan positif signifikan antara *corporate governance* dengan kinerja

operasional. Sedangkan pada struktur kepemilikan tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan adanya inkonsistensi dari beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah kepatuhan pengungkapan pelaporan dan mekanisme *Good Corporate Governance* serta hubungannya dengan nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Kusumawati dan Riyanto (2005), yang berjudul “Analisis Pengaruh *Compliance Reporting* dan Struktur Dewan Terhadap Kinerja”. Maka penelitian ini diberi judul “**Analisis Pengaruh *Compliance Reporting* dan Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah tingkat *compliance reporting* dalam laporan tahunan berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015?
2. Apakah mekanisme *good corporate governance* mempengaruhi nilai pasar perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015?

3. Apakah *compliance reporting* dan mekanisme *good corporate governance* bersama-sama mempengaruhi nilai pasar perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Adanya pengaruh tingkat *compliance reporting* dalam laporan tahunan berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
2. Adanya pengaruh mekanisme *good corporate governance* mempengaruhi nilai pasar perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
3. Adanya pengaruh *compliance reporting* dan mekanisme *good corporate governance* bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *compliance reporting* dan

mekanisme *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis : Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan *compliance reporting* dan mekanisme *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan dan memberikan informasi untuk pihak yang terkait dengan perusahaan periode 2011-2015 di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian, penelitian – penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel–variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen) dan definisi operasional variabel,

populasi dan sampel penelitian, jenis data yang digunakan untuk penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis untuk penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN PENELITIAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan dan saran-saran untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

